**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WDP untuk LKPD Kab. Aceh Tenggara TA 2014**

**Banda Aceh, Jumat ( 29 Mei 2015 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Ketigabelas di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kab. Aceh Tenggara dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kab. Aceh Tenggara untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Dengan Pengecualian"** atau *"Qualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Kas pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Belum Tertib;
3. Saldo Piutang PBB P2 Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat Belum Divalidasi serta Piutang PBB P2 TA 2014 Tidak Dapat Ditelusuri Rinciannya;
4. Investasi Permanen Belum Disajikan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2014 Belum Didukung Qanun Penyertaan Modal;
5. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Belum Memadai;
6. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
	* + 1. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA 2014 Belum Memadai dan Belum Dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
			2. Pertanggungjawaban Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Petugas Kesehatan/Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Pengeluaran Riil;
			3. Uang Persediaan Tahun Anggaran 2007 s.d. 2011 Belum Disetorkan ke Kas Daerah;

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Aceh Tenggara segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*